

PERSEPSI DAN ASPIRASI MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP PENYIAPAN ULAMA MELALUI PESANTREN: STUDI KASUS DI DELAPAN KOTA

Husen Hasan Basri

Abstract

The aim of this research is to describe pesantren community's perception and aspiration in preparing of ulama through pesantren education. The research was conducted in eight locations, namely, Medan, Agam, Lampung, Ciamis, Brebes, Kediri, Banjarmasin, and Balikpapan. The method was a quantitative approach and the instruments for collecting data used were questionnaire for pesantren community (ustadz and santri) and non-pesantren community (formal leader, informal leader, and religion bureaucrats), and interview guidance for pesantren leaders. It is found that pesantren community still perceived that pondok pesantren is regarded as the most effective institution for preparing the ulama.

Keywords: *perception, aspiration, pesantren community, preparation of ulama.*

Lahir di Sukabumi, 24 Oktober 1976.

Pernah belajar di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Ciamis, selesai tahun 1995. Meraih gelar S 1 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam tahun 2000. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S 2 di Universitas Indonesia, Program Kajian Timur Tengah dan Islam, Kekhususan Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah. Bekerja di Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Para pimpinan pesantren (kyai, ajengan, tuan guru, dan sebutan lainnya), pada mulanya, tidak bermaksud untuk mempersiapkan anak didiknya (santri) menjadi seorang ulama dalam proses pendidikannya. Para pimpinan pesantren membebaskan anak didiknya kelak untuk menjadi apa pun. Seorang pimpinan pesantren hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan menuntun santrinya supaya memiliki kepribadian muslim yang baik sekaligus bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun pimpinan pesantren tidak mempersiapkan secara khusus santrinya menjadi ulama, pesantren-pesantren terbukti telah melahirkan dan mencetak ulama-ulama yang handal. Melalui sistem pendidikannya, kaderisasi ulama di pesantren berjalan secara alami. Pesantren dengan pendidikannya dipandang masyarakat sebagai tempat penyiapan ulama yang mampu menjawab tantangan zamannya sehingga dihormati dan disegani oleh masyarakat karena peran yang dimainkannya saat itu benar-benar telah memenuhi harapan masyarakat (K.H Wahid Hasyim: 1950).

Seiring dengan perubahan sosial masyarakat akibat dari proses

modernisasi dan globalisasi, pesantren telah mengalami diversifikasi bentuk dan jenis pendidikan. Bentuk dan jenis pendidikan itu adalah pendidikan non formal yang secara khusus mendalami ilmu-ilmu agama, pendidikan yang menyelenggarakan sistem madrasah, dan pendidikan yang menyelenggarakan sistem sekolah (Mastuhu:1994 dan Nata: 2005). Namun bentuk dan jenis pendidikan pesantren itu, khususnya terkait dengan fungsi sebagai penyiapan kader ulama, dianggap oleh sebagian para ulama telah mereduksi misi utama pendidikan pesantren sebagai pusat *tafaqub fiddin* (pendalaman ilmu-ilmu agama) atau telah memudarnya peran dan fungsi pesantren sebagai tempat kaderisasi ulama (Dasrizal dan Yahya:2003).

Pada pihak lain terdapat pandangan sebagian para ulama yang melihat masih besarnya fungsi pesantren sebagai basis penyiapan ulama (Azra: 2000 dan Dhofier: 1987). Tetapi, ulama yang dihasilkan lembaga pesantren saat ini tidak seperti ulama yang difahami zaman dahulu. Akibat terjadinya transformasi pendidikan di pesantren dengan segala bentuk penambahan fungsi pesantren seperti sebagai pusat pengembangan ekonomi

masyarakat, alumni pesantren tidak saja menjadi 'ulama' saja, melainkan juga dapat menjadi 'ulama intelektual' dan 'intelektual ulama'. Adanya krisis pesantren dalam menghasilkan ulama tidak berdasar karena titel ulama merupakan hak prerogatif masyarakat dan tidak ada kriteria formal seperti persyaratan studi, ijazah dan sebagainya. Ulama itu merupakan status sosial yang diberikan kepada orang yang mempunyai karakteristik keperibadian tertentu, terutama kedalaman pengetahuan agama dan keutuhan moral (Abdullah:1987).

Perbedaan persepsi warga pesantren terhadap penyiapan ulama melalui pendidikan di pesantren dipengaruhi oleh makna ulama dan institusi pesantren. Azyumardi Azra (2000) mengatakan pengertian ulama sebagai seorang kyai yang berakar di pesantren tradisional seharusnya diubah karena perubahan masyarakat, proses modernisasi, dan pembangunan. Namun menurutnya, selama ini sebagian umat Islam masih mempertahankan pengertian lama, akibatnya timbul anggapan bahwa kita mengalami krisis ulama. Padahal, lanjutnya, kalau pengertian lama ini diubah, yakni bahwa seorang ulama adalah

orang yang memiliki pemahaman keagamaan Islam yang luas sekaligus mampu membaca kitab kuning kita sebenarnya memiliki banyak ulama. Menurut Azra, sekarang ini kekhawatiran terhadap krisis pesantren dalam menyiapkan kader ulama bisa diminimalisir oleh pertumbuhan pesantren kota yang sistem pendidikannya disesuaikan dengan perubahan zaman. Menurut M. Quraish Shihab (1992), karena kualifikasi ulama yang diperlukan tidak sesederhana seperti yang sudah dihasilkan dan persoalan menyangkut kualitas, intensitas dan efektivitas lembaga-lembaga pendidikan agama yang dimiliki umat Islam, maka pesantren harus merespon makna ulama dan merubah sistem pendidikan dan pengajarannya yang diperlukan pada masa kini dan masa datang.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat pesantren terhadap penyiapan ulama di pesantren?
2. Bagaimana aspirasi masyarakat pesantren terhadap penyiapan ulama di pesantren?

Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan persepsi masyarakat pesantren terhadap penyediaan ulama di pesantren
2. Menggambarkan aspirasi masyarakat pesantren terhadap penyediaan ulama di pesantren.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk merumuskan program Departemen Agama dalam peningkatan pelayanan kepada umat beragama, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Sedangkan dari segi akademis, penelitian ini dapat menambah kajian tentang *persepsi* dan *aspirasi*, khususnya persepsi dan aspirasi terhadap fungsi pendidikan pesantren dalam penyediaan ulama yang belum banyak dikaji.

Kerangka Teori

Persepsi

Persepsi adalah proses kategorisasi. Organisme dirangsang oleh suatu masukan tertentu (obyek-obyek di luar, peristiwa, dan lain-lain) dan organisme itu berespons dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori (golongan) obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa. Proses menghubungkan

ini adalah proses yang aktif di mana individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari kategori yang tepat sehingga ia dapat mengenali atau memberi arti kepada masukan tersebut. (Wirawan: 2003; 88-89). Djapri Basri (1983) mengatakan persepsi (*perception*) adalah kemampuan individu untuk mengamati perangsang (*stimulus*) sesuatu hingga berkesan menjadi pemahaman, pengetahuan, sikap dan tanggapan-tanggapan. Dalam persepsi itu ada hubungan antara pengamatan dan perangsang, yang mana hubungan antara keduanya harus sesuai. Menurut Jalaludin Rahmat persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rahmat: 1994:48-67).

Dalam penelitian ini, persepsi adalah kemampuan masyarakat pesantren untuk mengenal, memahami, merespon dan menafsirkan secara tepat dan benar terhadap fungsi pesantren sebagai tempat penyediaan ulama yang dilakukan pondok pesantren

Aspirasi

Aspirasi adalah harapan dan keinginan seseorang terhadap sesuatu. Harapan adalah kesediaan

(*readiness*) untuk mendapat penguat (*reinforcement*). Penguat adalah pengalaman atau penghayatan tentang suatu hasil yang memuaskan atau yang menunjukkan harapan. Harapan itu adalah fungsi dari dorongan (*drive*), perkiraan tentang menyenangkan atau tidaknya hasil dan perkiraan tentang kemungkinan hasil-hasil itu akan benar-benar terjadi. Kesiapan (*readiness*) adalah tingkat kesiapan individu menghadapi hasil. Sedangkan dorongan (*drive*) adalah tingkat ketegangan dan tingkat reaktivitas yang ditunjukkan oleh individu. Perkiraan tentang menyenangkan tidaknya dan kemungkinan terjadinya suatu hasil adalah penilaian individu tentang hasil tersebut (Wirawan:2003: 200).

Dalam penelitian, aspirasi yang dimaksud adalah harapan dan keinginan komunitas pesantren terhadap sosok ulama dan fungsi pesantren dalam menyiapkan kader ulama.

Masyarakat Pesantren

Masyarakat pesantren terbagi dua, yaitu warga pesantren dan warga luar pesantren yang memiliki hubungan erat dengan pesantren. Yang termasuk warga pesantren adalah pimpinan pesantren yang menjadi pengasuh pesantren, para

ustadz, dan para santri. Adapun warga luar pesantren yang memiliki hubungan erat dengan pesantren adalah golongan santri (Abdurrahman Wahid: 1974;46). Adapun warga luar pesantren yang memiliki hubungan erat dengan pesantren adalah golongan santri. (Geertz: 1989; 165-289). Menurut Azyumardi Azra, santri adalah mereka yang berasal dari pesantren atau mereka yang taat menjalankan ajaran Islam (Azra: 2002).

Bertitik tolak dari pendapat Wahid dan Geertz, maka yang dimaksud dengan masyarakat dalam penelitian ini adalah komunitas pesantren yang meliputi warga pesantren seperti kiai, ustadz, dan santri. Sedangkan warga luar pesantren adalah golongan santri yang memiliki hubungan erat dengan pesantren seperti orang yang aktif di ormas Islam, orang yang aktif di partai politik yang berbasis muslim, orang yang memiliki lembaga dan yayasan pendidikan Islam, orang yang aktif di MUI, dan birokrat Departemen Agama.

Penyiapan Ulama

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama

Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Saat ini, hampir di setiap pesantren terdapat jenis-jenis pendidikan, yaitu “pesantren” yang hanya mempelajari agama dengan kitab-kitab keagamaan klasik atau “kitab kuning” dan berbentuk non-formal, madrasah, sekolah, dan beberapa diantaranya perguruan tinggi baik agama maupun umum. Ketiga jenis pendidikan yang terakhir ini berbentuk formal. Tetapi keempatnya hidup dalam satu kampus pesantren, dan oleh karena itu semua siswanya disebut santri (Mastuhu:1994).

Salah satu dari fungsi pesantren adalah sebagai tempat penyiapan ulama. Sejak kelahirannya, pesantren-pesantren melalui sistem pendidikannya telah berhasil mencetak dan melahirkan ulama. Penyiapan ulama di pesantren berjalan secara alami. Tetapi, saat sistem madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi diadopsi oleh pesantren terlihat ada perubahan orientasi pendidikan di pesantren. Materi-materi pendidikannya pun tidak hanya terfokus pada pelajaran-pelajaran agama melainkan ada penambahan-penambahan materi pelajaran umum. Walaupun telah terjadi diversifikasi jenis dan bentuk pendidikan di pesantren tetapi masih banyak di

antara masyarakat pesantren yang secara spesifik ingin tetap melestarikan ulama. Beragam pola pendidikan penyiapan ulama telah dilakukan di pesantren diantaranya pola *salaf* dan pola pesantren tinggi (Tholkhah: 1987).

Salah satu program pendidikan untuk menyiapkan kader ulama yang sudah lama dilaksanakan di kalangan pesantren dan telah mendapat legalitas dari pemerintah sejak tahun 2002 adalah ma’had aly. Ide ini lahir tahun 1989 dari hasil konsensus para kyai pesantren yang dimotori almarhum KH As’ad Syamsul Arifin (Dasrizal dan Yahya:2003). Dalam buku *Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Pendidikan Ma’had Aly* yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Tahun 2002 disebutkan bahwa ma’had aly merupakan salah satu bentuk usaha pelebagaan tradisi akademik pesantren. Cikal bakal pelebagaan ini adalah program-program kajian takhassus yang sudah berkembang berpuluh-puluh tahun di lingkungan pesantren. Pembentukan ma’had aly dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren tingkat tinggi yang mampu melahirkan ulama di tengah-

tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Depag:2002).

Berkaitan dengan pesantren dalam menyelenggarakan ma'had aly, penelitian Puslitbang Penda tahun 2003 melakukan studi dalam rangka mengevaluasi program ma'had aly. Hasil Kajian itu menyimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang paling memungkinkan untuk penyelenggaraan ma'had aly karena lembaga ini memiliki potensi intelektual, sosial dan kultural yang memadai. Lebih lanjut kesimpulan penelitian itu adalah masih terdapat perbedaan pemahaman tentang ma'had aly di kalangan pesantren. Sebagian pesantren memahami ma'had aly sebagai pesantren tinggi untuk membina calon ulama tanpa harus berijazah. Di sisi lain, sebagian pesantren menginginkan ma'had aly sejajar dengan perguruan tinggi, karena itu perlu diberi gelar, ada penjenjangan dan sertifikat. Kesimpulan lain dari penelitian itu adalah menyangkut kompetensi keagamaan dan keilmuan yang seharusnya dimiliki oleh lulusan ma'had aly. Sebagian pesantren mengharapkan ulama yang lahir dari ma'had aly adalah ulama fikih seperti pesantren Salafiyah Sukorejo. Sebagian lagi menginginkan ulama ushul fikih

seperti Sumatra Thawalib Parabek. Perbedaan ini disebabkan oleh penekanan disiplin kajian keilmuan pesantren masing-masing (Dasrizal dan Yahya: 2003).

Meskipun arus globalisasi telah berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat, pesantren tetap memiliki potensi untuk menyiapkan kader ulama. Penelitian Muhtarom mengeksplorasi sejauhmana globalisasi mempengaruhi sistem reproduksi ulama pesantren tradisional, dan bagaimana cara pesantren tradisional merespon dan mengantisipasi arus globalisasi. Dengan mengambil kasus dua pondok pesantren tradisional di kabupaten Pati Jawa Tengah, yakni pondok pesantren Raudlatul Ulum dan pondok pesantren Bustanuth Tholibin, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa globalisasi tidak berpengaruh pada wilayah *'aqidah* komunitas pondok pesantren tradisional. Globalisasi berdampak dangkal terhadap reproduksi ulama, *tafaqquh fi al-din*, tata nilai Islam, tradisionalisme, kemapanan pada pembelajaran kitab kuning dengan metode sorogan, bandongan, hafalan, dan kebiasaan kontemplatif di kedua pondok pesantren tersebut, sekalipun keduanya belum mempunyai konsep dan pemahaman teoritik tentang nilai-nilai budaya global

yang dapat memperkokoh tradisi-tradisinya (Muhtarom:2005;3)

Metodologi Penelitian

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner dan wawancara.

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di delapan kota, yaitu: Medan, Agam, Lampung, Ciamis, Brebes, Kediri, Banjarmasin dan Balikpapan. Pemilihan kota itu berdasarkan kriteria adanya pesantren yang menyelenggarakan program penyiapan kader ulama. Penelitian dilakukan pada Juni-Juli 2006.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah masyarakat pesantren di delapan kota sasaran. Karena tidak ada kerangka sampling jumlah masyarakat pesantren di delapan kota tersebut, maka penarikan samplingnya dilakukan dengan cara *quota sampling*. Dari setiap kota, populasi dibagi kepada dua kelompok, yakni: 1) kelompok warga pesantren (pimpinan pesantren, ustadz, dan santri) dan 2) ke-

lompok warga luar pesantren *formal leader* (camat), *informal leader* (okoh ormas Islam, tokoh politik muslim, pimpinan yayasan atau lembaga pendidikan Islam, dan pimpinan MUI), dan birokrat Departemen Agama (Kepala Seksi Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren).

Dari setiap kota ditentukan sampel 62 orang, yang terdiri dari 2 pimpinan pesantren, 4 ustadz laki-laki, 4 ustadz perempuan, 20 santri laki-laki, 20 santri perempuan, 2 *formal leader* (camat), dan 8 *informal leader* (tokoh ormas Islam, tokoh politik, dan pimpinan yayasan atau lembaga pendidikan Islam, dan pimpinan MUI), dan 2 birokrat Departemen Agama. Maka jumlah sampel seluruhnya adalah 480 (di luar pimpinan pesantren) orang.

Dari delapan kota tersebut, instrumen berhasil dikumpulkan setelah proses *cleaning data* sebanyak 356 orang dari kelompok warga pesantren (di luar pimpinan pesantren) dan 87 orang dari kelompok warga luar pesantren, dengan keseluruhan responden berjumlah 443 orang.

Profil Responden

- Responden kelompok warga pesantren. Dari 59 responden ustadz, sekitar 63 % motif mengajar ustadz adalah mengamalkan

ilmu. Hampir seluruh ustadz (91,5 %) pernah belajar di pesantren. Sedangkan motif santri belajar di pesantren adalah hanya 57 santri (19,2 %) dari 297 santri yang ingin menjadi ulama.

- Responden kelompok warga luar pesantren. Dari 87 responden kelompok warga luar pesantren, sebanyak 72 % pernah belajar di pesantren. Dan anak-anak mereka belajar di pesantren sekitar 55 %.

Pengolahan dan Analisa data

Pengolahan data menggunakan program SPSS 12. Data yang terkumpul dianalisa melalui penyajian gambaran umum responden. Selanjutnya, untuk data kuantitatif dianalisa melalui tabel frekuensi dan data kualitatif dianalisa melalui interpretasi.

HASIL PENELITIAN

Persepsi Masyarakat Pesantren

Meskipun pesantren telah mengalami diversifikasi bentuk dan jenis pendidikannya, kelompok warga pesantren (82,9 %) menyatakan setuju pesantren masih berfungsi sebagai tempat penyiapan ulama. Begitu juga dengan kelompok warga luar pesantren (91,9

%) setuju pesantren masih berfungsi sebagai tempat penyiapan ulama. Karenanya baik kelompok warga pesantren (91,6 %) maupun kelompok warga luar pesantren (96,6 %) menyatakan setuju pesantren mampu menyiapkan ulama. Alasan mereka itu didasarkan pada potensi keilmuan pesantren yang luas (91 %) di kelompok warga pesantren dan (91,9 %) di kelompok warga luar pesantren. Kalaupun ada yang setuju bahwa pesantren tidak mampu menyiapkan ulama, jumlahnya kecil yakni (4,5 %) kelompok warga pesantren dan (3,4 %) kelompok warga luar pesantren. Alasan ketidakmampuan pesantren dalam penyiapan ulama karena ada sistem madrasah hanya disetujui oleh sebagian kecil (5,1 %) kelompok warga luar pesantren dan (5,7 %) kelompok warga luar pesantren, dan karena ada sistem sekolah juga disetujui oleh sebagian kecil (6,7 %) kelompok warga pesantren dan (5,7 %) kelompok warga luar pesantren. Sistem sekolah dan madrasah yang sering disebut-sebut sebagai penyebab kemunduran pesantren dalam penyiapan ulama berdasarkan temuan ini dapat terbantahkan. Masih berjalannya fungsi pesantren sebagai lembaga penyiapan ulama dan kemamam-

puan pesantren dalam menyiapkan ulama, sebagian besar kelompok warga pesantren (80,1 %) dan sebagian kelompok warga luar pesantren (65,4 %) tidak setuju kalau pesantren mengalami krisis. Baik sebagian besar kelompok warga pesantren (67,2 %) maupun sebagian besar kelompok warga luar pesantren (74,7 %) setuju bahwa *ma'had aly* sebagai lembaga pendidikan ulama tingkat tinggi sebagai solusi krisis penyiapan ulama melalui pesantren. Lihat tabel berikut:

Para pimpinan pesantren memandang bahwa pesantren masih memiliki andil besar dalam menyiapkan ulama. K.H. Irfan Hielmy berpandangan bahwa dibandingkan dengan peran Perguruan Tinggi Agama Islam, pesantren lebih banyak menghasilkan calon ulama. Dan menurutnya bisa dipastikan sebagian besar ulama di Indonesia adalah alumni pesantren. Tapi pesantren yang mana yang berfungsi sebagai tempat penyiapan ulama. Dalam hal ini Drs. K.H. Horman-syah Haika menyatakan bahwa pe-

Tabel 01 : Fungsi pesantren sebagai tempat penyiapan ulama

No	Pernyataan	Kelompok warga pesantren (%)			Kelompok warga luar pesantren (%)		
		S	TS	TT	S	TS	TT
1	Pesantren berfungsi sebagai tempat penyiapan ulama	82,9	16,8	0,3	91,9	8	0,1
2	Pesantren mampu menyiapkan ulama	91,6	8,4	0	96,6	3,4	0
3	Pesantren mampu menyiapkan ulama karena memiliki potensi keilmuan yang luas	91	7,3	1,7	91,9	8	0,1
4	Pesantren tidak mampu menyiapkan ulama	4,5	95	5	3,4	85,4	11,2
5	Pesantren tidak mampu menyiapkan ulama karena ada sistem sekolah di pesantren	6,7	93,3	0	5,7	94,2	0,1
6	Pesantren tidak mampu menyiapkan ulama karena ada sistem madrasah di pesantren	5,1	94,6	0,3	5,7	94,2	0,1
7	Pesantren mengalami krisis dalam penyiapan ulama	19,9	80,1	0	34,5	65,4	0,1
8	Ma'had aly adalah lembaga pendidikan ulama tingkat tinggi	67,2	30,9	1,9	74,7	21,8	3,5

santrén yang didirikan sebelum tahun 1945 seperti pesantren al-Munawwir Krapyak dan beberapa pesantren di Jawa Timur, Kalimantan, Sumatra Barat, dan Sulawesi masih berfungsi sebagai tempat penyiapan ulama. Tapi pesantren yang didirikan setelah tahun 1945, apalagi yang didirikan tahun 60-an sampai sekarang, menurutnya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui secara jelas sejauhmana pondok pesantren tersebut berfungsi sebagai tempat penyiapan ulama.

Bagi K.H. Imam Yahya, pesantren yang berfungsi sebagai tempat penyiapan ulama adalah pesantren yang di dalamnya ada program untuk menyiapkan ulama. Menurutnya, jika pesantren tidak ada program penyiapan ulama maka itu namanya bukan pesantren tapi madrasah atau sekolah atau majlis taklim. Lepas dari pendirian pesantren sebelum tahun 1945 dan setelah 1945 seperti dituturkan K.H. Hormansyah Haika, sebagian besar pimpinan pesantren memandang pesantren mampu menyiapkan ulama. Banyak alasan yang dikemukakan para pimpinan pesantren berkaitan dengan kemampuan pesantren dalam menyiapkan ulama. Alasan mereka paling tidak menyangkut potensi pesantren masing-masing

yang sedang dikelolanya. K.H. Irfan Hielmy mengatakan kemampuan pesantren dalam menyiapkan ulama berkaitan dengan potensi yang dimiliki pesantren, yaitu; sumber daya manusia, tradisi pendidikan dan pengajaran, lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana pendidikan, dan memiliki komitmen. Buya A. Gaffar berpendapat potensi pesantren dalam menyiapkan ulama, yaitu; adanya asrama sebagai tempat para santri belajar lebih intensif dan mendalam, adanya Buya yang banyak menguasai kitab-kitab klasik, adanya buku-buku referensi yang berisi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Hal senada diungkapkan oleh K.H. Imam Yahya yang mengatakan bahwa potensi pesantren dapat dilihat dari kehadiran kiai dan ustadz di pesantren, santri yang mengaji, dan asrama sebagai tempat yang efektif dalam mengkonsentrasikan waktunya untuk belajar.

Para pimpinan pesantren mengakui bahwa saat ini ada pesantren yang dianggap tidak mampu menyiapkan ulama. K.H. Imam Yahya mengatakan banyak pesantren yang namanya saja, tapi bukan pesantren yang sebenarnya karena mereka tidak mampu. Hal itu disebabkan kekurangan sumber daya ustadz

yang mampu membaca dan mengajar kitab yang *mu'tabarab* kepada santrinya. Menurut K.H. Irfan Hilmy ketidakmampuan sebuah pesantren dalam menyiapkan ulama terkait dengan visi, tujuan, dan tradisi pendidikan yang dikembangkan pesantren yang bersangkutan. Kalau ada pesantren yang tidak mampu menyiapkan ulama, menurut K.H. Hormansyah Holika bisa dilihat dari latar belakang berdiri dan tujuan pesantren. Tapi kalau ada pesantren yang tujuan utamanya tidak menyiapkan ulama itu bukan pesantren tetapi hanya majlis taklim. Sebab majlis taklim tujuan utamanya bukan untuk menyiapkan ulama tetapi hanya sebagai wadah untuk belajar agama Islam. Namun menurut K.H. Moh Lutfi dengan perkembangan yang ada sekarang pesantren kurang mampu menyiapkan kader ulama seperti jaman dahulu karena pesantren sekarang tidak lagi hanya mempelajari ilmu agama tetapi juga ilmu umum sehingga porsi ilmu agamanya kurang, dan motivasi santri tidak seperti jaman dahulu yang benar-benar belajar ilmu agama. Buya A. Gaffar menyayangkan kalau ada pesantren yang tidak mampu menyiapkan ulama. Jika tidak mampu, kata Gaffar, sebaiknya jangan menamakan lagi istilah

pesantren. Bahkan menurut Mukhlis Hasyim, MA, pesantren yang tidak mampu menyiapkan kader ulama sebaiknya berhenti, sebab ulama yang setengah-setengah akan lebih merugikan agama.

Terhadap pendapat yang mengatakan bahwa pesantren mengalami krisis dalam menyiapkan ulama, para pimpinan pesantren merespon cukup beragam. Menurut K.H. Imam Yahya tidak ada istilah krisis dalam penyiapan ulama karena jika ada sumber daya manusia maka masalah penyiapan ulama bisa dilaksanakan. Tapi kalau dalam bentuk terprogram dengan sistem yang baik dan secara profesional mungkin banyak pesantren yang masih belum siap. Tapi di pesantren yang dipimpinnya yaitu pesantren Lirboyo krisis itu belum terjadi. K.H. Irfan Hielmy mengatakan pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Mungkin ada pesantren yang mengalami krisis seperti itu, terutama karena disebabkan oleh problem mutu input santrinya atau karena motivasi untuk belajar agama tidak begitu kuat. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar pesantren masih tetap memiliki tradisi pendidikan yang mempersiapkan kader ulama. Pendapat yang sama dikata-

kan oleh K.H. Hormansyah Haika. Menurutnya, pendapat tentang pesantren mengalami krisis dalam menyiapkan ulama mungkin tidak benar tapi juga mungkin tidak salah. Tidak benarnya karena yang namanya tugas dan fungsi utama pesantren adalah menyiapkan ulama, terutama pesantren yang didirikan sebelum tahun 1945. Menurutnya coba perhatikan ulama-ulama yang betul-betul menjadi panutan masyarakat dari dulu sampai sekarang adalah ulama yang lahir dari pesantren. Tidak salahnya karena mungkin ada pesantren, di mana sejak berdiri sampai sekarang, belum pernah melahirkan ulama atau pernah melahirkan ulama tapi ulama tersebut tidak sesuai harapan masyarakat karena kehadiran ulama tersebut tidak menjawab dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian muncul pendapat bahwa pesantren mengalami krisis dalam menyiapkan ulama. Ia mempertanyakan pendapat tersebut dengan mengatakan, pesantren yang mana yang mengalami krisis menyiapkan ulama.

Lain halnya dengan pendapat para pimpinan pesantren di atas, Mukhlis Hasyim, MA, secara tegas menyatakan sangat tepat (setuju) terhadap pendapat yang mengata-

kan bahwa pesantren mengalami krisis dalam menyiapkan ulama. Tetapi, menurutnya, pendapat tersebut berlaku untuk pesantren-pesantren tertentu. Namun, lanjutnya, masih banyak pesantren salafiyah yang masih menyiapkan santri-santrinya ke arah *tahfidzul Quran*. Fuad Abbas menambahkan bahwa yang berpendapat tentang pesantren mengalami krisis dalam menyiapkan ulama adalah pendapat orang yang belum terjun langsung ke dalam dunia pesantren.

Aspirasi Masyarakat Pesantren

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kelompok warga pesantren dan kelompok warga luar pesantren memandang masih berfungsinya pesantren sebagai tempat penyiapan ulama. Tetapi, pendidikan pesantren seperti apa untuk mencetak kader ulama. Berikut ini akan dilihat aspirasi mereka terhadap kurikulum, bahasa pengantar, materi, dan pencapaian pendidikan pesantren.

Untuk melihat aspirasi mereka terhadap pesantren seperti apa untuk mencetak kader ulama, penulis mengacu pada upaya yang telah dilakukan pihak Departemen Agama dalam rangka menyiapkan kader ulama melalui program ma'-

had aly di pesantren. Dalam kata lain apakah program yang telah digariskan pihak Departemen Agama tersebut sesuai dengan aspirasi kelompok warga pesantren dan kelompok warga luar pesantren. Oleh karena itu perlu mengetahui secara teknis pelaksanaan program tersebut di lapangan. Penulis menggunakan buku *Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Pendidikan Ma'had Aly* yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Tahun 2002.

Kurikulum Pendidikan

Pendidikan dan pengajaran pendidikan kader ulama dilaksana-

pesantren mengharapkan kurikulum dirancang bersama-sama antara pesantren, Departemen Agama dan MUI. Sebagian besar kelompok warga pesantren setuju (70,2 %) kurikulum dirancang Departemen Agama, dan setuju (72,5 %) dirancang MUI. Begitu juga sebagian besar kelompok warga luar pesantren setuju (79,3 %) kurikulum dirancang Departemen Agama, dan setuju (78,1 %) dirancang MUI. Ini artinya bahwa keterlibatan Departemen Agama dan MUI diperlukan oleh komunitas pesantren dalam merancang kurikulum pendidikan kader ulama. Lihat tabel berikut:

Tabel 02: Kurikulum pendidikan pesantren yang diharapkan mampu mencetak kader ulama
Warga pesantren (N=356) Warga luar pesantren (N=87)

No	Kurikulum pendidikan	Kelompok warga pesantren (%)			Kelompok warga luar pesantren (%)		
		S	TS	TT	S	TS	TT
1	Dirancang oleh pesantren	88,8	7,9	3,3	98,8	1,1	0,1
2	Dirancang Departemen Agama	70,2	26,1	3,7	79,3	19,5	1,2
3	Dirancang MUI	72,5	22,7	4,8	78,1	20,7	1,2

kan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing pesantren. Disamping kurikulum pendidikan dirancang oleh pesantren yang bersangkutan, komunitas

Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar dalam pendidikan kader ulama tidak saja bahasa Arab dan bahasa Indonesia seperti yang tercantum dalam *Petunjuk*

Pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama, tetapi bahasa Inggris dan bahasa daerah. Hal ini bisa dilihat dari sebagian besar kelompok warga pesantren (69,1 %) setuju bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dan (50,5 %) setuju bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pelaksanaan pendidikan kader ulama. Tapi, pada kelompok warga luar pesantren (49,4 %) tidak setuju kalau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pelaksanaan pendidikan kader ulama. Lihat tabel berikut:

dengan merujuk pada berbagai madzhab pemikiran dan aneka literatur, baik klasik maupun modern, dan c) komponen ilmu-ilmu alat yang meliputi bahasa, *mantiq*, dan ilmu usul. Materi ilmu usul fikih dan ilmu mantiq adalah materi yang wajib diajarkan di pesantren. Penguasaan terhadap kedua materi ini merupakan syarat pokok bagi seorang alumni santri—khususnya di pesantren tradisional—yang hendak membuka pesantren baru. Pertanyaannya, apakah komunitas

Tabel 03: Bahasa pengantar pendidikan pesantren yang diharapkan mampu mencetak kader ulama
 Warga pesantren (N=356) Warga luar pesantren (N=87)

No	Bahasa pengantar	Kelompok warga pesantren (%)			Kelompok warga luar pesantren (%)		
		S	TS	TT	S	TS	TT
1	Bahasa Daerah	50,5	46,3	3,2	48,2	49,4	2,4
2	Bahasa Indonesia	73,6	23,1	3,3	74,7	23	2,3
3	Bahasa Arab	84	12,8	3,2	88,5	11,5	0
4	Bahasa Inggris	69,1	25,3	5,6	62	35,5	2,5

Materi Pendidikan

Komponen kurikulum ma'had aly terdiri dari: a) komponen pengkajian tekstual yang merujuk pada al-Quran, al-Hadits, dan *al-kutub al-mu'tabarab*, b) komponen pengembangan wawasan substansial yang meliputi disiplin keislaman dan disiplin umum yang relevan

pesantren masih mengharapkan kedua materi ini diajarkan di pesantren yang hendak mencetak kader ulama. Sebagian besar kelompok warga pesantren (80,9 %) setuju ilmu usul fikih, dan (66,6) setuju ilmu mantiq menjadi materi pendidikan pesantren yang diharapkan mampu mencetak kader ulama.

Sebagian besar kelompok warga luar pesantren juga (92 %) setuju ilmu usul fikih, dan (77 %) setuju ilmu mantiq menjadi materi pendidikan pesantren yang diharapkan mampu mencetak kader ulama. Lihat tabel 04 berikut:

lafiyah Sukorejo, mengharapkan ulama yang lahir dari ma'had aly adalah ulama fikih. Sebagian lagi, seperti Sumatra Thawalib, menginginkan ulama ushul fikih. Perbedaan ini disebabkan oleh penekanan disiplin kajian keilmuan pe-

Tabel 04: Materi pendidikan pesantren yang diharapkan mampu mencetak kader ulama
Warga pesantren (N=356) warga luar pesantren (N=87)

No	Materi pendidikan	Kelompok warga pesantren (%)			Kelompok warga luar pesantren (%)		
		S	TS	TT	S	TS	TT
1	Ilmu usul fikih	80,9	15,7	3,4	92	8	0
2	Ilmu mantiq	66,6	27,3	6,1	77	21,8	1,2

Pencapaian Pendidikan

Salah satu temuan dari penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tahun 2003 tentang evaluasi ma'had aly adalah harapan para penyelenggara ma'had aly terhadap lulusan ma'had aly. Sebagian pesantren, seperti Sa-

santren masing-masing. Ternyata harapan para pengelola pesantren tersebut tidak sesuai dengan komunitas pesantren. Kelompok warga pesantren (50,5 %) dan kelompok warga luar pesantren (59,8 %) tidak setuju kalau pencapaian pendidikan kader ulama itu adalah ulama fikih.

Lihat tabel 05 berikut:

Tabel 05: Pencapaian pendidikan yang diharapkan mampu mencetak kader ulama
Warga pesantren (N=356) warga luar pesantren (N=87)

No	Pencapaian pendidikan	Kelompok warga pesantren (%)			Kelompok warga luar pesantren (%)		
		S	TS	TT	S	TS	TT
1	Ulama fikih	46,3	50,5	3,2	39,1	59,8	1,1

Seperti apa materi pendidikan yang mampu mencetak kader ulama. Terhadap hal ini, ada pimpinan yang hanya menyebutkan materi-materi secara global, ada pimpinan yang menyebutkan materi-materi secara rinci. Untuk yang pertama, disebutkan materi pendidikan yang integratif yang mencakup disiplin ilmu-ilmu Islam, ilmu umum, keterampilan, olahraga dan lain-lain (K.H. Irfan Hielmy), materi yang menyajikan ilmu yang tergolong *mabadiul Asyroh* (K.H. Fuad Abbas), materi agama secara umum ditambah praktek dan pengamalan yang selalu terkontrol (K.H. Mukhlas Hasyim, MA), dan ilmu-ilmu syariah yang bersumber dari kitab-kitab klasik dan ilmu-ilmu yang bersifat empirik yang dikaitkan dengan al-Quran dan hadits (Drs. KH Hormansyah Haika). Untuk yang kedua, disebutkan materi tafsir, hadits, usul fikih, dan tasawuf (KH Imam Yahya, Mohammad Lutfi, dan Buya A. Gaffar).

Terkait dengan kurikulum pendidikan pesantren diharapkan mampu mencetak kader ulama. KH Irfan Hielmy menyatakan kurikulum yang mencerminkan kandungan keilmuan Islam (*turats* dan *'ashry*)

dan kandungan ilmu-ilmu umum yang dituangkan dalam suatu sistem kurikulum yang mencakup unsur tujuan, materi, metode, dan evaluasi. KH Imam Yahya menjelaskan kurikulum keislaman dan wawasan ilmu kemasyarakatan. K.H. Fuad Abbas menginginkan kurikulum terpadu yang mempertahankan kurikulum pesantren ditambah kurikulum relevan lainnya. Drs. KH Hormansyah Haika mengatakan secara rinci kurikulum yang diharapkan yaitu; syariah, tahfidz al-Quran, tafsir al-Quran, hadits, akhlakul karimah, ketauhidan, dan bahasa.

Para pimpinan pesantren mengatakan proses pembelajaran pesantren diharapkan mampu mencetak kader ulama adalah yang menggabungkan antara tradisi pembelajaran pesantren dengan proses pembelajaran modern. Pencapaian pendidikan pesantren yang mampu mencetak kader ulama ketika alumni pesantren secara nyata telah berkiprah di masyarakat. Bagi mereka, bentuk pesantren seperti apapun dapat mencetak kader ulama dengan syarat didukung oleh berbagai sumber daya yang memadai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Masyarakat pesantren di delapan kota mempersepsikan pesantren masih berfungsi sebagai lembaga penyiapan ulama. Model pesantren apa pun diorientasikan pada penyiapan ulama yang menjadi visi, misi dan tradisi pesantren itu sendiri. Oleh karena itu, ke depan, masyarakat tetap memandang perlu penguatan pesantren sebagai tempat penyiapan ulama.
2. Dalam upaya penyiapan ulama, masyarakat pesantren di delapan kota mengaspirasi perlunya pesantren mengupayakan beberapa hal terkait dengan fungsi pesantren sebagai tempat penyiapan ulama. *Pertama*, merancang kurikulum yang dilakukan atas kerjasama antara pesantren dengan Departemen agama, dan MUI. *Kedua*, menggunakan dan mentradisikan penggunaan bahasa multilingual, yaitu: Bahasa Arab dan Inggris di samping bahasa Indonesia dan Daerah sebagai bahasa pengantar. *Ketiga*, menjadikan mata pelajaran *ilmu ushul fikih* dan *ilmu mantiq* (logika) sebagai mata pelajaran pokok

(*core subject-matters*), namun demikian tidak harus diorientasikan pada penyiapan ulama fikih.

Rekomendasi

1. Perlu penguatan peran dan fungsi pesantren sebagai tempat penyiapan ulama di masa depan melalui program: (1) intensifikasi kerjasama antara pesantren, Depag, dan instansi lainnya, (2) pengembangan kurikulum yang menekankan pada materi ushul fiqh, ilmu mantiq, dan penekanan bahasa Asing (Arab dan Inggris) sebagai bahasa pengantar
2. Kepada Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Madrasah Diniyah Departemen Agama perlu menyempurnakan kembali petunjuk pelaksanaan pendidikan kader ulama (program *ma'had aly*) dengan cara mempertimbangkan harapan masyarakat di atas.

SUMBER BACAAN

- Abdullah, Taufik, (1987): "Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia" dalam *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta, LP3ES. Hal. 54-87

- Azra, Azyumardi, (2000): "Kritik terhadap Ulama Muhammadiyah" dalam Azyumardi Azra, *Islam Substantif; Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung, Mizan. Hal. 85-96
- Dasrizal dan Azril Yahya, (2003): *Potensi Pondok Pesantren Menyelenggarakan Ma'had Aly*. Jakarta, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Dhofier, Zamakhsyari, (1987): *Studi Kasus Lembaga Pengkaderan Ulama*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Pendidikan Pesantren dan Penyiapan Ulama. P3M, Jakarta, 24-25 Juni 1987.
- Hasyim, Wahid, (1950): *Mengapa Saya Milik NU*. Jakarta, Idayu.
- Mastuhu, (1994): *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta, INIS.
- Muhtarom, (2005): *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi: Resistensi Tradisional Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nata, Abuddin, (2005): *Perubahan Sistem Pendidikan Pesantren Seiring dengan Perubahan Sosial Ekonomi*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Revitalisasi Pendidikan Pesantren di Era Globalisasi. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag. Cisarua, Wisma Bahtera, 11-13 Agustus.
- Rahmat, Jalaluddin, (1994): *Psikologi Komunikasi*. Bandung, Rosdakarya, edisi revisi.
- Shihab, M. Quraish, (1992): "Ulama Sebagai Pewaris Nabi" dalam *Membumikan Al-Quran*. Bandung, Mizan. Hal 32-43 .
- Tholkhah, Imam, (1987): *Studi Kasus Lembaga Pengkaderan Ulama*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Pendidikan Pesantren dan Penyiapan Ulama. P3M, Jakarta, 24-25 Juni 1987.
- Wahid, Abdurahaman, (1974): "Pesantren sebagai Subkultur" dalam *Pesantren dan Pembaruan*. Ed. M. Dawam Rahardjo. Jakarta, LP3ES. Hal. 46-70
- Wirawan, Sarlito, (1999): *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Qomar, Mujamil, (2005): *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta, Erlangga.